Efektifitas Penerapan Program E-Tilang Dalam Mewujudkan Penegakan Hukum Lalu Lintas

Bakri^{1,2}, Muhammad Syarif Nuh & Baharuddin Badaru¹

¹ Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

² Koresponden Penulis, E-mail: bakrilion@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk Menganalisis efektifitas penerapan program e-tilang dalam mewujudkan penegakan hukum lalu lintas di Wilayah Hukum Polres Bone, serta faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi upaya penegakan hukum berlalu lintas melalui program e-tilang. Berdasarkan analisis terhadap data dan fakta penulis berkesimpulan bahwa penerapan program e-tilang sudah cukup efektif dalam mewujudkan penegakan hukum lalu lintas bebas korupsi di Wilayah Hukum Polres Bone. Hal ini dapat dilihat melalui peningkatan jumlah pelanggaran yang terjadi antara tahun 2016 ke tahun 2017 yang meningkat secara signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa program e-tilang sangat efisien dan cukup efektif menekan angka pungli. Pada sistem e-tilang, oknum tidak dapat lagi melakukan negosiasi terkait dengan pelanggaran lalu lintas, karena sudah tercatat secara digital dan harus selesai sampai dengan adanya putusan pengadilan. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi upaya penegakan hukum berlalu lintas melalui program e-tilang di Wilayah Hukum Polres Bone meliputi Faktor hukum, Faktor penegak hukum, Faktor sarana, Faktor masyarakat, dan Faktor kebudayaan

Kata Kunci: Penerapan; Program; E-Tilang; Lalu Lintas

ABSTRACT

This study aims to analyze the effectiveness of the application of the e-ticketing program in realizing traffic law enforcement in the Bone Police Legal Area, as well as what factors influence the effort to enforce traffic law through the e-ticketing program. Based on an analysis of the data and facts, the author concludes that the application of the e-ticketing program has been quite effective in realizing the enforcement of corruption-free traffic law in the Bone Police Legal Area. This can be seen through the increase in the number of violations that occurred between 2016 and 2017 which increased significantly. This shows that the e-ticketing program is very efficient and quite effective at reducing extortion rates. In the e-ticketing system, the person can no longer conduct negotiations related to traffic violations, because it has been digitally recorded and must be finished until a court decision is made. What factors influence traffic law enforcement efforts through the e-ticketing program in the Bone Police Regional Law Area include legal factors, law enforcement factors, facility factors, community factors, and cultural factors

Keywords: Implementation; Program; E-ticket; Traffic

PENDAHULUAN

Pada era globalisasi saat ini, kebutuhan akan penggunaan teknologi sangat berperan penting dalam kehidupan manusia. Begitu juga halnya dengan lalu lintas selaku sarana penunjang kehidupan manusia yang merupakan dampak dari penggunaan teknologi. Di era pesatnya teknologi seperti saat ini, keberadaan kendaraan bermotor sangatlah menunjang kehidupan manusia dalam menjalankan kegiatan sehari-hari (Indrajit, 2000).

Meskipun membawa sejumlah keuntungan, kehadiran kendaraan bermotor juga membawa konsekuensi lain, diantaranya penyediaan jalan yang memadai, pengaturan pergerakan kendaraan, dan masalah kecelakaan (Rochman & Agis, 2020). Di negara berkembang seperti Indonesia, kesadaran tertib di jalan raya masih sangat rendah, sehingga untuk menemukan pelanggaran yang dilakukan pengguna jalan, terutama pengendara mobil dan motor, cukup mudah. Mulai dari pengendara motor berjalan melawan arah, tidak menggunakan helm. Mobil menerobos lampu merah, hingga angkutan umum yang berhenti tidak pada tempatnya (Pembayun, Mazid, & Rihardi, 2019).

Setiap pelanggaran hukum yang terjadi harus ditindaki oleh aparat penegak hukum dengan sikap profesional dan menjunjung tinggi hak asasi setiap warganya. Peranan aparat hukum sangat menentukan proses penegakan hukum dalam suatu negara, karena sebaik apapun aturan hukum yang dibuat, bila kualitas penegak hukumnya kurang baik maka akan menghambat pelaksanaan penegakan hukum tersebut (Fiqi, 2019). Oleh karena itu, penegakan hukum dalam berlalu lintas tidak hanya dapat terwujud dari aspek aturan hukum yang memadai saja, melainkan juga harus memperhatikan aspek keseriusan aparat penegak hukumnya dan kultur masyarakatnya (Junef, 2014).

Permasalahan seputar penegakan hukum lalu lintas, merupakan masalah klasik yang baru menjadi isu nasional pasca di bentuknya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Edy, Hamka, & Maldun, 2018). Dalam peraturan tersebut, landasan filosofis pembentukan Perpres ini berlandaskan pada fakta bahwa praktik pungutan liar telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien, dan mampu menimbulkan efek jera dan sebagai upaya pemberantasan pungutan liar perlu dibentuk satuan tugas sapu bersih pungutan liar.

Penegakan hukum lalu lintas selama ini dinilai merupakan salah satu sektor yang terindikasi maraknya pungutan liar. Oleh karena itu, sebagai tindak lanjut atas dikeluarkannya Perpres tentang sapu bersih pungli, Kepolisian Republik Indonesia melakukan pembenahan pada penindakan pelanggaran disiplin berlalu lintas melalui program *e-tilang* (Setiyanto, Gunarto, & Wahyuningsih, 2017).

Penggunaan aplikasi tersebut sangat memudahkan para pelanggar lalu lintas dalam menjalankan sanksi. Pasalnya, meski tidak memiliki aplikasi atau pun ponsel berbasis android, masyarakat dapat langsung datang ke bank dan dipandu oleh *customer service* yang menangani di sana. "Nanti pakai androidnya pak polisi. Akan keluar nomor ID pelanggaran dan pelanggar bisa bawa ke bank untuk melakukan

pembayaran." Walaupun diharuskan membayar penuh di awal, pelanggar lalu lintas dapat menerima kembali kelebihan uang setelah putusan pengadilan.

Pada dasarnya, keberadaan program e-tilang ini tidak menjamin terjadinya penurunan angka pungli di Indonesia. Jika diperhatikan alur pelaksanaan e-tilang, ada satu langkah yang bisa menjadi kelemahan. Kelemahan itu terdapat pada langkah awal alur e-tilang (Wayne, 2020). Jika ada seorang pengendara yang tertangkap melanggar, petugas Polisi adalah satu-satunya yang punya otoritas memberikan penafsiran terkait adanya dugaan pelanggaran. Jika si petugas Polisi berbuat curang, bisa saja dia memutuskan untuk tidak mencatat pelanggaran di aplikasi e-tilang. Apalagi bila sebelumnya sudah ada "tawar-menawar" dengan pengendara. Kemungkinan ini bisa terjadi mengingat besarnya denda maksimal yang harus dibayar.

Selain itu, kondisi keuangan masyarakat juga perlu dipertimbangkan dalam penerapan program e-tilang ini. Pada sistem Tilang konvensional, pelanggar akan diundang ikut sidang di pengadilan paling lama dua pekan setelah dinyatakan melakukan pelanggaran lalu lintas. Cara ini memberikan keuntungan bagi mereka yang sedang tidak punya uang untuk mempersiapkan denda yang akan dijatuhkan kepadanya. Namun tidak demikian halnya dengan e-tilang, karena program ini mengharuskan si pelanggar untuk melakukan pembayaran dengan jumlah besaran denda maksimal. Dalam hal si pelanggar tidak memiliki dana, tentu program e-tilang ini tidak dapat dilakukan.

Terkait dengan pembayaran besaran denda ini pun masih menjadi kontroversi dalam tataran penerapan hukum. Meskipun dikatakan bahwa dana yang diserahkan hanyalah di titipkan ke pihak Bank, namun demikian penjatuhan sanksi tersebut bertentangan dengan asas *Presumption of Innocence* atau asas praduga tak bersalah. *Presumption of innocence* adalah salah satu unsur dari "Rule of Law" seperti terdapat di dalam Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) pasal 66 : "Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian". Dan di dalam Penjelasan dari pasal 66 dikatakan pula bahwa ketentuan ini adalah penjelmaan dari asas praduga tak bersalah. Hal ini tambah diperkuat oleh Pasal 158 KUHAP yang berbunyi, "Hakim dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan di sidang tentang keyakinan mengenai salah atau tidaknya terdakwa". Di dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) berdasarkan sistem hukum Common Law, asas hukum ini merupakan prasyarat utama untuk menetapkan bahwa suatu proses telah berlangsung jujur, adil, dan tidak memihak (*due process of law*) (Ariefulloh, Asis & Maskun, 2019)

Harapan akan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih khususnya di bidang penegakan hukum berlalu lintas, kiranya perlu memperhatikan berbagai aspek yang berkaitan dengan hal tersebut di atas. Soerjono Soekanto (2004) mengatakan bahwa ada lima faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum, yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri (dibatasi ada undang-undang saja),
2. Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang mengharapakan hukum,
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum,

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan,
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Dalam penerapan program e-tilang, perlu dipertimbangkan beberapa faktor yang mampu memengaruhi efektifitas penerapannya. Oleh karena itu, berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis berinisiatif untuk mengangkat permasalahan ini ke dalam suatu karya ilmiah tesis, dengan judul “Efektifitas Penerapan Program E-Tilang Dalam Mewujudkan Penegakan Hukum Lalu Lintas Bebas Korupsi”.

METODE PENELITIAN

Dalam rangka memperoleh data yang relevan dengan kebutuhan penulisan tesis ini, penulis akan melakukan penelitian di Polres Bone. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Polres Bone merupakan salah satu daerah pelaksana teknis pelanggaran E-tilang (Tilang Elektronik) yang ada di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Bone. Tipe penelitian pada penulisan tesis ini adalah tipe penelitian Hukum yakni penelitian hukum empiris. Penelitian pada penulisan karya ilmiah ini dilakukan melalui pengumpulan data berdasarkan data yang dikumpulkan penulis pada beberapa lokasi penelitian khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan E-tilang (Tilang Elektronik) yang ada di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Bone.

PEMBAHASAN

A. Efektifitas penerapan program *e-tilang* dalam mewujudkan penegakan hukum lalu lintas bebas korupsi di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Bone

E-Tilang merupakan digitalisasi proses tilang, dengan memanfaatkan teknologi diharapkan seluruh proses tilang akan lebih efisien. Dalam Pasal 272 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Jalan disebutkan bahwa untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, dapat digunakan peralatan elektronik (Putra, 2020). Hasil penggunaan peralatan elektronik ini dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Yang dimaksud dengan “peralatan elektronik” adalah alat perekam kejadian untuk menyimpan informasi. Mengenai apa yang tertulis di pasal 272 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Jalan, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mengatur bahwa penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di dasarkan atas hasil : (1) Temuan dalam proses pemeriksaan kendaraan; (2) laporan; dan/atau (3) rekaman peralatan elektronik. Penerapan e-Tilang merupakan langkah baik yang diambil pemerintah dalam mewujudkan Good Governance agar pelayanan publik yang diberikan dapat lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bripta Jamaluddin selaku Penyidik Lantas Polres Bone, pada tanggal 26 Juni 2018 mengemukakan bahwa:

Penerapan Sistem E-tilang ini, telah mengganti proses tilang manual yang dulunya menggunakan surat tilang (Wulandari, 2020) dimana pengendara yang melanggar akan dicatat melalui aplikasi elektronik yang dilakukan oleh aparat kepolisian (Djanggih & Ahmad, 2017). Dengan adanya E-tilang, tentu akan memudahkan masyarakat untuk membayar denda melalui bank. Namun, tidak semua masyarakat dapat mengikuti prosedur-prosedur E-tilang yang diberikan oleh kepolisian, terutama untuk masyarakat awam yang kurang mengerti tentang teknologi (Sari & Hendriana, 2019). Sistem E-tilang yang diberlakukan memberikan perhatian bagi masyarakat. Dengan sistem E-tilang tersebut memberikan dampak yang baik bagi masyarakat yang kenal dengan teknologi. Namun, bagi masyarakat yang kurang kenal dengan teknologi kesulitan dalam mengikuti perkembangan teknologi ini.

Dalam penerapannya, memang sistem e-tilang ini masih mengalami berbagai hambatan dan kendala. Pada wawancara tanggal 26 Juni 2018 dengan Bripta Jamaluddin selaku Penyidik Lantas Polres Bonemen menjelaskan alur proses penerapan e-tilang sebagai berikut:

- Polisi akan memasukkan data si pelanggar pada aplikasi e-tilang sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Setelah pengisian data ini selesai, notifikasi nomor pembayaran tilang akan keluar dan bisa dipergunakan.
- Pengendara akan mendapatkan notifikasi nomor pembayaran tilang dari petugas yang melakukan pendataan.
- Pengendara bisa melakukan pembayaran denda tilang sesuai dengan notifikasi yang telah didapatkannya dari petugas di lapangan. Proses pembayaran denda tilang ini bisa dilakukan melalui teller bank ataupun mesin ATM. Pelanggar akan dianjurkan untuk membayar denda tilang dengan nominal terbesar, agar proses selanjutnya bisa berjalan dengan baik tapi sisa pembayaran ini kelak akan dikembalikan kepada pelanggar.
- Setelah melakukan pembayaran denda tilang melalui layanan bank, pelanggar bisa segera mengambil barang bukti yang disita oleh petugas tersebut. Hal ini harus dilakukan dengan cara menunjukkan bukti pembayaran yang telah dilakukan oleh pelanggar.
- Jika telah melakukan pembayaran denda tilang dan pengambilan barang bukti di lokasi, pelanggar bisa saja memilih untuk tidak mengikuti sendiri sidang pelanggaran atau diwakilkan oleh pihak kepolisian. Hal ini akan menguntungkan, sebab pelanggar bisa melakukan rutinitasnya sebagaimana biasanya tanpa perlu menghadiri sidang tilang tersebut.
- Di dalam persidangan, hakim akan memutuskan nominal denda yang harus dibayarkan oleh pelanggar.
- Selanjutnya, keputusan tilang tersebut akan dieksekusi oleh petugas kejaksaan yang bertugas di sana.
- Beberapa saat kemudian, pelanggar akan menerima notifikasi melalui SMS terkait dengan keputusan pengadilan mengenai tilang yang bersangkutan, termasuk informasi mengenai sisa denda titipan tilang yang masih ada pada pihak bank.
- Setelah pemberitahuan tersebut, sisa dana denda tilang bisa diambil oleh pelanggar secara langsung atau menggunakan layanan transfer bank.

Bagan 1 Alur Posedur E-Tilang

Sumber data: Polres Bone, 2018.

Dalam pelaksanaannya, terdapat berbagai kendala yang kemudian merubah proses e-tilang sebagaimana mestinya. Penggunaan e-tilang sebagaimana yang dijelaskan tersebut mengharuskan setiap masyarakat memiliki kesiapan dana yang dapat digunakan pada waktu e-tilang dilakukan. Namun dalam praktiknya tidak semua masyarakat memiliki dana, oleh karenanya e-tilang yang diberlakukan adalah pelanggar tetap harus ke pengadilan untuk melihat besaran denda atas pelanggaranannya kemudian melakukan pembayaran di Kejaksaan,

Terkait dengan Efektifitas e tilang ini penulis juga melakukan wawancara dengan Bripka Jamaluddin selaku Penyidik Lantas Polres Bonemengemukakan bahwa:

Program E-tilang ini cepat waktu penindakannya, sehingga pelaksanaannya juga tidak menyita waktu aparat kepolisian dan dapat melaksanakan tupoksi lainnya. Selain itu pelanggar tidak perlu hadir sidang di pengadilan negeri karena sudah terkoneksi dengan bank untuk pembayaran denda (Subuh, *et.al*, 2019). Dari aspek kemudahan bagi Polri, data tilang langsung terkoneksi dengan *back office* sehingga diperoleh data akurat yang dapat digunakan untuk mengetahui data pelanggaran seseorang dan bermanfaat guna edukasi dan evaluasi pada saat perpanjangan SIM.

Untuk mencapai sebuah proses tilang yang relevan maka perlu adanya sebuah sistem informasi yang didukung oleh sebuah perangkat lunak berbasis jaringan atau website yang memungkinkan penyebaran informasi kepada setiap anggota kepolisian secara realtime. Perangkat lunak yang dimaksud adalah sebuah program aplikasi yang dapat menyimpan informasi setiap penindakan pelanggaran aturan lalu lintas yang dilakukan masyarakat dalam sebuah database, dan ketika pelanggaran terulang oleh orang yang sama, maka program aplikasi atau sistem informasi ini akan mengevaluasi pelanggaran yang dilakukan sebelumnya, dan data pelanggaran yang ditampilkan kembali akan menjadi dasar penindakan selanjutnya, sehingga pelanggar tidak mendapatkan sanksi pada level yang sama namun dapat ditindak pada level yang lebih tinggi, dan tentu ini akan memberikan efek jera pada pelanggar.

Berikut ini data yang penulis peroleh terkait dengan implementasi E-tilang di wilayah hukum Kepolisian Resor Bone tahun 2016-2017.

Tabel 1
Data Penanganan Pelanggaran Lalu Lintas
Wilayah Hukum Kepolisian Resor Bone Tahun 2016

No	Kesatuan	Jumlah GAR	Vonnis	Denda
1	2016	4.310	4.220	255.540.000
2	2017	4.087	4.182	376.380.000

Sumber data: Kepolisian Resor Bone, Tahun 2018

Jika diperhatikan data tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa penerapan E-tilang ini tentu sangat efektif dari aspek penindakan karena penggunaannya yang praktis sehingga penindakan dapat dilakukan lebih intensif. Pada tahun 2016 telah dilakukan penindakan terhadap 4.310 pelanggaran dan pada Tahun 2017 terdapat 4.087 pelanggaran. Dengan jumlah pelanggaran yang relatif sama, hasil denda tilang yang masuk ke kas negara sebagai pendapatan bukan pajak justru semakin meningkat. Sejak diberlakukan secara nasional pada Desember 2016, dapat dilihat perbedaan dari aspek perolehan denda yakni tahun 2016 hasil denda mencapai Rp. 255.540.000 sedangkan untuk tahun 2017 diperoleh Rp. 376.380.000. Hal ini mengindikasikan, bahwa program e-tilang sangat efektif dari aspek efisiensi dan efektivitas menekan angka pungli.

Untuk mengetahui apakah program e-tilang ini benar-benar efektif dalam menekan angka pungli, pada tanggal 26 Juni 2018 penulis melakukan wawancara dengan Bripka Jamaluddin selaku Anggota Lantas Polres Bone mengemukakan bahwa:

Dari segi efisiensi, e-Tilang sangatlah efisien. Tanpa menggunakan kertas semua tindak pelanggaran lalu lintas dicatat oleh sistem digital sehingga mengurangi biaya kertas sebagai tanda bukti pelanggaran. Pelanggar peraturan lalu lintas pun tidak perlu bolak-balik dan antre ke persidangan untuk menyelesaikan masalahnya. Karena mereka akan dikirimkan notifikasi digital oleh sistem kapan kasusnya akan disidangkan. Dengan memanfaatkan teknologi seluruh proses tilang akan lebih efisien dan juga efektif juga membantu pihak kepolisian dalam manajemen administrasi. Aplikasi dikategorikan kedalam dua user, yang pertama yaitu pihak

kepolisian dan yang kedua adalah pihak kejaksaan. Pada sisi kepolisian, sistem akan berjalan pada komputer tablet dengan sistem operasi Android sedangkan pada pihak kejaksaan sistem akan berjalan dalam bentuk website, sebagai eksekutor seperti proses sidang manual.

Berkaitan dengan peran e-tilang guna menekan angka pungli, Bripka Jamaluddin selaku Penyidik Lantas Polres Bone menjelaskan:

Terdapat beberapa kelebihan dalam program ini yang dapat mencegah terjadinya pungli. Pertama, adanya sistem keterbukaan dan standarisasi yang jelas dan mudah dipahami dari semua proses-proses tilang seseorang, dengan demikian keberadaan e-tilang ini mewujudkan transparansi dan kepastian hukum bagi masyarakat. Dalam pelaksanaan e-Tilang keterbukaan informasi sangat terjamin karena segala informasi tentang tindakan pelanggaran lalu lintas akan ada dalam aplikasi serta telah terstandarisasi oleh sistem sesuai kebijakan dari instansi yang bersangkutan termasuk di dalamnya Polisi. Jumlah denda yang dikenakan pun sudah pasti tidak ada tawar menawar lagi dengan oknum polisi karena tidak adanya proses tatap muka dengan oknum polisi secara langsung (biasanya disebut pungutan liar) karena telah ditetapkan kriteria besaran denda sesuai tindak pelanggaran yang dilakukan).

Pada tanggal 26 Juni 2018, penulis juga melakukan wawancara dengan Bripka Jamaluddin selaku Penyidik Lantas Polres Boneselaku BA Unit Laka Lantas polres Bone beliau mengemukakan bahwa:

Adanya e-Tilang tentu akan menunjang akuntabilitas dari kepolisian yang berwenang menangani masalah pelanggaran peraturan lalu lintas. Segala pelanggaran lalu lintas akan tercatat secara otomatis oleh sistem dari input hingga outputnya. Sehingga tidak ada data penanganan tindakan pelanggaran yang terlewat. Dan pastinya jika ada hal yang mengganjal mengenai data yang ada pasti dapat dilacak dengan lebih mudah.

Selanjutnya Brigpol M. Ariansyah selaku Anggota Kepolisian Unit Lantas Polres Bone pada wawancara tanggal 26 Juni 2016, juga mengemukakan bahwa.

Dari aspek pemberdayaan masyarakat, e-Tilang ini masyarakat akan mengetahui segala informasi mengenai tindakan yang dapat dikategorikan pelanggaran lalu lintas serta hukuman akibat tindakan tersebut. Sehingga diharapkan masyarakat sadar hukum dan tidak melakukan pelanggaran lagi. Dan juga diharapkan dapat menularkan sikap tertib lalu lintas setelah mengetahui peraturan yang ada kepada orang di sekelilingnya agar tidak melanggar peraturan yang ada. Dalam layanan e-Tilang, setiap pelanggar yang melakukan perbuatan pelanggaran yang sama akan mendapatkan denda atau hukuman yang sama tanpa pandang bulu. Karena telah diatur oleh sistem yang ditentukan oleh pihak yang berwenang. Tidak ada lagi tawar menawar antara polisi dan orang yang terkena tilang walaupun orang yang terkena tilang tersebut pejabat penting misalnya, tentu sistem akan tetap mencatat pelanggaran tersebut dan otomatis orang yang melakukan pelanggaran tersebut terkena tilang.

Berdasarkan hasil wawancara sebagaimana penulis paparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa langkah yang diambil Pemerintah dengan menerapkan e-Tilang telah sesuai dengan amanat menuju *Good Governance*. Dalam penerapan e-Tilang partisipasi masyarakat dapat dinilai baik hal ini dilihat dari adanya pengambilan keputusan yang didasarkan konsensus bersama yang melibatkan kepolisian,

kejaksaan, pengadilan dan bank tempat penitipan denda tilang. Penegakan hukum yang jelas dan tanpa pandang bulu dapat meningkatnya kepedulian masyarakat akan keselamatan sehingga nantinya pelanggaran dalam berlalu lintas dapat berkurang.

Selanjutnya Bripka Jamaluddin selaku Penyidik Lantas Polres Bonepada wawancara tanggal 26 Juni 2018 mengemukakan bahwa:

Dengan aplikasi berbasis android, masyarakat tidak lagi diwajibkan datang ke pengadilan untuk membayar denda tilang. Program ini menjawab keluhan masyarakat tentang maraknya praktik pungutan liar dan percaloan dalam pengurusan SIM dan STNK. Bila sudah berjalan efektif, masyarakat hanya tinggal mengunduh aplikasi tersebut, bila masyarakat sudah menggunakan aplikasi tersebut, saat terjadi penindakan petugas langsung memberikan ID tilang kepada pengendara sebagai registrasinya. Jadi untuk yang sudah pakai e-Tilang masyarakat cukup masukan ID tilang yang diberikan petugas, kemudian akan muncul besaran denda yang harus dibayarkan. Tentu hal ini menghilangkan adanya potensi pungutan liar yang selama ini dirisaukan. Setelah nominal denda keluar masyarakat tinggal memilih menu bank untuk dijadikan fasilitas pembayarannya. Atau bisa juga memakai ponsel petugas agar lebih mudah, bagi yang tidak memiliki aplikasi m-banking bisa langsung ke ATM terdekat.

Dengan menerapkan e-Tilang pemerintah dapat dinilai lebih transparan hal ini ditujukan dengan Adanya akses informasi yang siap dan mudah dijangkau, bebas diperoleh dan tepat waktu, Bertambahnya pengetahuan dan wawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan, dan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan.

Penerapan e-Tilang pemerintah dinilai lebih akuntabel dengan menerapkan sistem e-Tilang ini karena dalam penerapannya sesuai dengan prosedur pelaksanaannya meskipun belum banyak masyarakat yang mengetahui mekanisme dari e-Tilang karena masih kurangnya sosialisasi. Adanya sanksi yang ditetapkan pada setiap kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan berlalu lintas dan penerapan e-Tilang setidaknya dapat meminimalisir terjadinya penyimpangan petugas kepolisian sebagai penidak, pada proses penuntutan maupun pada proses peradilan. Berdasarkan hasil pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa program e-tilang ini cukup efektif dalam memberantas pungli.

a. Transparan

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Penerapan prinsip transparansi dalam penegakan hukum berlalu lintas dapat diukur dengan indikator sebagai berikut:

- a. Adanya akses informasi yang siap dan mudah dijangkau, bebas diperoleh dan tepat waktu

Dalam penerapan e-Tilang akses informasi yang siap dan mudah dijangkau sangat menjamin transparansi karena segala informasi tentang tindakan pelanggaran lalu lintas akan ada dalam aplikasi serta telah terstandarisasi oleh sistem sesuai kebijakan dari instansi yang bersangkutan termasuk di

dalamnya Polisi. Aplikasi e-Tilang pun bebas diperoleh oleh siapapun masyarakat yang ingin mendapatkannya dengan cara mendownload dari aplikasi yang menyediakannya.

- b. Bertambahnya pengetahuan dan wawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan khususnya dibidang penegakan hukum lalu lintas

Dengan diterapkannya program e-Tilang pengetahuan dan wawasan masyarakat terhadap penyelenggaran pemerintah dalam hal ini mengenai pelanggaran lalu lintas dapat bertambah. Masyarakat mudah mengetahui tentang jenis-jenis pelanggaran, jumlah denda yang dikenakan serta hasil dari proses putusan persidangan.

- c. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan

Dengan kemudahan informasi yang didapat oleh masyarakat maka kepercayaan masyarakat pada kepolisian akan meningkat hal ini juga didukung dengan keterbukaan informasi sangat terjamin karena segala informasi mengenai pelanggaran lalu lintas akan ada diaplikasi serta telah tersentandarisasi sesuai kebijakan instansi bersangkutan.

b. Akuntabilitas

Prinsip dari akuntabilitas yaitu menghendaki bahwa setiap pelaksanaan tugas dan hasil akhir dari kegiatan pemerintahan dan pembangunan harus dapat dan wajib dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat dan para pihak yang terkait sesuai dengan peraturan. Dalam penerapan program e-Tilang pihak kepolisian telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan prosedur yang ada, hanya saja masih banyak dari masyarakat yang belum mengetahui mengenai mekanisme dari pelaksanaannya. Hal ini dikarenakan masih minimnya sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat sehingga perlu adanya sosialisasi yang dilakukan secara maksimal agar masyarakat mengetahui mengenai mekanisme dari e-Tilang secara benar.

Dalam aplikasi e-Tilang jumlah denda yang dikenakan pun sudah pasti tidak ada tawar menawar lagi dengan oknum polisi karena tidak adanya proses tatap muka dengan oknum polisi secara langsung (biasanya disebut pungutan liar) karena telah ditetapkan kriteria besaran denda sesuai tindak pelanggaran yang dilakukan). Fondasi dasar e-Tilang dengan menitipkan denda tilang di bank pada dasarnya bermaksud untuk menyadarkan kepada pelanggar atau masyarakat tatkala melakukan pelanggaran menitipkan denda tilang di bank bukan kepada siapapun. Hal ini pun nantinya akan membuat masyarakat untuk dapat lebih bertanggung jawab.

Mekanisme pelaporan maupun penyebaran informasi dari kegiatan eTilang masih belum begitu jelas karena kembali lagi kurangnya sosialisasi dari pihak yang berwenang dan juga karena ini merupakan produk layanan kepada masyarakat yang masih baru). penerapan e-Tilang setidaknya dapat meminimalisir terjadinya penyimpangan petugas kepolisian sebagai penidak, pada proses penuntutan maupun pada proses peradilan.

B. Faktor-faktor yang mempengaruhi upaya penegakan hukum berlalu lintas melalui program *e-tilang* di Wilayah Hukum Polres Bone

Secara umum, penegakan hukum dapat diartikan sebagai proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu-lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Ditinjau dari segi subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normative atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, segi subyeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Pengertian penegakan hukum dapat pula ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini pengertiannya mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pada nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalam bunyi atau formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.

Instrumen *e-tilang*, merupakan salah satu upaya yang dilakukan POLRI dalam menegakkan hukum berlalu lintas yang ada di Indonesia. Berbagai hambatan yang selama ini dihadapi, diharapkan dapat diminimalisir dengan hadirnya sistem *e-tilang*. Namun demikian, menjalankan sebuah inovasi dalam penegakan hukum terutama yang berkaitan dengan kecanggihan informasi teknologi (IT) tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Berbagai hambatan tentu juga dihadapi dalam upaya menerapkan sebuah inovasi baru dalam penegakan hukum.

Menurut Briпка Jamaluddin selaku Penyidik Lantas Polres Boneselaku Kasat Lantas Polres Bone pada wawancara yang penulis lakukan tanggal 26 Juni 2018, dikemukakan bahwa:

Implementasi *e-tilang* khususnya yang dilaksanakan di daerah Kepolisian Resor Bone, masih terbentur sejumlah persoalan. Kendala internal misalnya, masalah koneksi internet yang berbeda tiap wilayah mengakibatkan pelaksanaan *e-tilang* ini belum sepenuhnya dapat diterapkan diseluruh wilayah yang berpotensi terjadi pelanggaran. Selain itu, belum adanya ponsel yang digunakan khusus untuk penindakan juga menjadi hal yang menghambat penggunaan *e-tilang*.

Selain faktor internal, juga terdapat faktor eksternal yaitu dari pihak pelanggar. Banyak pelanggar yang tidak bersedia memberikan nomor ponselnya karena merasa itu adalah privasi. Penggunaan aplikasi *e-tilang* harus mencantumkan nomor HP, sementara masih banyak warga masyarakat yang keberatan.

Menanggapi pendapat tersebut di atas, penulis berpendapat bahwa memang di beberapa daerah di wilayah hukum Polres Bone masih belum terjangkau sinyal internet yang baik, apalagi untuk daerah yang jauh dari Ibu Kota, sinyal internet

hanya tersedia di daerah perkotaan saja. Sedangkan pelanggaran lalu lintas bisa terjadi dimana saja.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Brigpol M. Ariansyah selaku Kasat Lantas Polres Bone, mengemukakan bahwa:

Masyarakat saat ini masih menganggap mekanisme e-tilang berbelit-belit, tapi sebenarnya bukan karena persoalan ribetnya namun masih terdapat beberapa golongan masyarakat yang kurang melek IT sehingga mereka beranggapan bahwa program ini ribet. Selain itu terdapat pula beberapa masyarakat yang masih apatis terhadap aplikasi e-tilang. Aplikasi e-tilang saat ini sudah beroperasi selama satu tahun. Padahal program e-tilang ini merupakan jawaban dari kegelisahan masyarakat akan maraknya pungli yang sering berlalu lintas.

Penulis berpendapat bahwa semestinya masyarakat menyambut antusias adanya program e-tilang ini. Hal ini dikarenakan program e-tilang merupakan salah satu bentuk inovasi dalam rangka menekan angka korupsi dalam penegakan hukum berlalu lintas. Dengan adanya program e-tilang ini, tentu keresahan masyarakat akan maraknya pungli dan pemerasan yang dilakukan terhadap pelanggar dapat diatasi.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Bripka Jamaluddin selaku Penyidik Lantas Polres Bone pada tanggal 27 Juni 2018 mengemukakan bahwa:

Kendala yang dihadapi saat ini adalah banyaknya kepemilikan kendaraan di Bone yang bermasalah, misalnya, banyaknya unit kendaraan yang tidak sesuai dengan surat kepemilikannya, soal alamat pemilik kendaraan yang tak akurat hingga soal jual beli mobil. Banyak kendaraan yang bukan miliknya sendiri sehingga menyulitkan untuk pendataan, seperti soal alamat pelanggar. Kendala lainnya adalah banyak kendaraan pembelian bekas yang tidak segera dibalik nama.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Brigpol M. Ariansyah selaku Anggota Kepolisian Unit Lantas Polres Bone pada tanggal 27 Juni 2018, pada intinya mengemukakan bahwa:

Masih ada beberapa petugas kepolisian di lapangan yang melakukan E-Tilang kepada pengendara tetapi tidak memasukan No Register Tilang ke dalam aplikasi. Sehingga hal ini tentunya menyulitkan ketika saat memproses STNK/SIM yang telah dilimpahkan di kejaksaan. Karena keterbatasan fasilitas, belum semua petugas yang menindak di lapangan punya handphone Android. Jadinya masih manual, aplikasinya juga tidak terisi penuh, seperti nomor registernya tak dimasukkan.

Berdasarkan beberapa hasil wawancara tersebut di atas, maka penulis mengemukakan faktor penghambat dalam penegakan hukum berlalu lintas di wilayah hukum kepolisian Polres Bone sebagai berikut:

1. Faktor hukum

Dalam Pasal 272 UU LLAJ disebutkan bahwa untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik. Hasil penggunaan peralatan elektronik ini dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Yang dimaksud dengan "peralatan elektronik" adalah alat perekam kejadian untuk menyimpan informasi.

Mengenai apa yang tertulis dalam Pasal 272 UU LLAJ kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal 23 PP 80/2012, yang mengatur bahwa penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didasarkan atas hasil:

- a. temuan dalam proses Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan;
- b. laporan; dan/atau
- c. rekaman peralatan elektronik.

Kakorlantas Polri Irjen Agung Budi Maryoto pada pelatihan teknis penggunaan aplikasi e-Tilang tanggal 25 Oktober 2016 yang diikuti Kasatlantas dari sejumlah Polres se-Indonesia, mengemukakan bahwa saat ini, polisi menggelar rapat dengan pihak Kejaksaan, Pengadilan dan Mahkamah Agung (MA) untuk mengubah sistem e-Tilang. Perlu payung hukum yang lebih tinggi untuk menerapkan sistem tersebut. Namun sampai dengan saat ini penulis belum menemukan adanya payung hukum yang dimaksud.

Dalam kesempatan tersebut beliau mengemukakan bahwa:

Tilang kan sudah ada payung hukumnya. Dalam mengubah sistem ini perlu payung hukum setingkat atau lebih tinggi, polisi sedang rapat dengan Kejaksaan, Pengadilan, dan MA. Beliau menambahkan Presiden Jokowi akan mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) terkait aplikasi e-Tilang tersebut. Pasalnya, saat ini tilang diharuskan sampai ke pengadilan. Sehingga dengan adanya sistem e-Tilang ini nantinya pihak Kasatlantas berkoordinasi dengan *Criminal Justice System* (CSJ) atau sistem peradilan pidana setempat terkait keputusan sanksi yang akan diberikan pengadilan kepada pelanggar lalu lintas. Ke depan titipan enggak maksimal tapi denda sesuai hasil keputusan bersama, cukup bayar, entri, bayar ATM, struk bisa ambil barang bukti yang disita selesai.

Penulis berpendapat bahwa payung hukum e-tilang yang nantinya akan dibuat, tidak hanya berfokus pada penyelesaian perkara yang efisien namun juga dapat dilaksanakan tanpa adanya benturan antara peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tata cara penyelesaian pelanggaran lalu lintas. Misalnya terkait dengan mekanisme pemeriksaan dan penetapan putusan, dimana masih terdapat permasalahan terkait dengan substansi hukumnya. Penyelesaian pelanggaran lalu lintas yang dicanangkan berpotensi bertabrakan dengan Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman. Aturan itu memberi keleluasaan penuh kepada hakim untuk membuat putusan seadil mungkin sesuai dengan tingkat kesalahan masing-masing pelanggar. Jangan sampai hakim justru diintervensi oleh tabel denda yang telah ditetapkan.

2. Faktor penegak hukum

Dari aspek penegak hukumnya, masih banyak aparat kepolisian yang belum dapat mengoperasikan aplikasi e-tilang. Dapat dipahami bahwa implementasi suatu inovasi yang berhubungan dengan informasi teknologi memang selalu terkendala pada masalah kemampuan sumber daya manusia. Beberapa anggota kepolisian di bidang lalu lintas, khususnya yang sudah berusia di atas 40 tahun, tidak sedikit yang sangat awam dengan dunia teknologi yang berbasis android. Tentunya hal ini menjadi salah satu penghambat pelaksanaan e-tilang. Perlu dilakukan peningkatan SDM melalui pelatihan ataupun kegiatan kursus

sehingga aparat dapat mendukung terwujudnya efisiensi dalam penerapan e-tilang ini.

3. Faktor sarana

Sebagaimana dijelaskan oleh beberapa narasumber sebelumnya, bahwa salah satu kendala utama dalam penerapan e-tilang adalah belum tersedianya fasilitas yang diberikan kepada setiap anggota kepolisian lalu lintas berupa hand phone berbasis android yang khusus digunakan untuk program e-tilang. Hal ini tentu sangat memberatkan aparat apabila tanggung jawab tersebut diberikan tanpa adanya dukungan fasilitas yang memadai. Selain itu mekanisme e-tilang yang membutuhkan ketersediaan akses jaringan internet juga menjadi kendala. Hal ini dikarenakan pada beberapa wilayah di daerah hukum Polres Bone, ketersediaan jaringan yang berbasis internet belum merata seperti di daerah pulau Jawa. Apabila terdapat pelanggar yang tertangkap tangan di jalan raya yang tidak ada sinyal internet, program e-tilang ini tidak dapat dilakukan.

4. Faktor Masyarakat

Seperti halnya kendala yang dihadapi aparat dalam hal pengoperasian sistem e-tilang, masyarakat juga pada dasarnya mengalami hal yang sama. Keterbatasan kemampuan dalam penggunaan informasi teknologi serta keterbatasan sarana pendukung seperti dana yang harus dibayarkan seketika, masih menjadi kendala penerapan e-tilang ini.

5. Faktor Kebudayaan

Faktor budaya, merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap efektifitas pelaksanaan e-tilang. Dalam pembahasan yang penulis lakukan dapat diketahui bahwa, masyarakat saat ini masih menganggap mekanisme e-tilang berbelit-belit, tapi sebenarnya bukan karena persoalan ribetnya namun masih terdapat beberapa golongan masyarakat yang kurang melek IT sehingga mereka beranggapan bahwa program ini ribet. Selain itu terdapat pula beberapa masyarakat yang masih apatis terhadap aplikasi e-tilang. Banyak pelanggar yang tidak bersedia memberikan nomor ponselnya karena merasa itu adalah privasi. Menggunakan aplikasi e-tilang harus mencantumkan nomor HP, sementara masih banyak warga masyarakat yang keberatan.

KESIMPULAN

Berdasar pada pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, penulis menyimpulkan bahwa:

1. Penerapan program e-tilang sudah cukup efektif dalam mewujudkan penegakan hukum lalu lintas bebas korupsi di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Bone. Hal ini dapat dilihat melalui peningkatan jumlah pelanggaran yang terjadi antara tahun 2016 ke tahun 2017 yang meningkat secara signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa program e-tilang sangat efisien dan cukup efektif menekan angka pungli. Pada sistem e-tilang, oknum tidak dapat lagi melakukan negosiasi terkait dengan pelanggaran lalu lintas, karena sudah tercatat secara digital dan harus selesai sampai dengan adanya putusan pengadilan.

2. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi upaya penegakan hukum berlalu lintas melalui program e-tilang di Wilayah Hukum Polres Bone meliputi:
 - a. Faktor hukum, yakni belum ada payung hukum yang mengatur mengenai teknis pelaksanaan e-tilang ini baik berbentuk Peraturan Perundang-undangan maupun Peraturan internal kepolisian. Selain itu masih terdapat permasalahan terkait dengan mekanisme penyelesaian pelanggaran lalu lintas yang sedang dilaksanakan dengan Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang memberi keleluasaan penuh kepada hakim untuk membuat putusan seadil dan seadil mungkin sesuai dengan tingkat kesalahan masing-masing pelanggar, sementara pada pelaksanaan e-tilang kepolisian dapat menetapkan jenis dan sanksi pelanggaran tanpa melalui proses persidangan.
 - b. Faktor penegak hukum, yakni masih banyak aparat kepolisian yang belum dapat mengoperasikan aplikasi e-tilang, khususnya yang sudah berusia di atas 40 tahun, yang sangat awam dengan dunia teknologi yang berbasis android.
 - c. Faktor sarana, yakni belum tersedianya fasilitas yang diberikan kepada setiap anggota kepolisian lalu lintas berupa hand phone berbasis android yang khusus digunakan untuk program e-tilang.
 - d. Faktor masyarakat, yakni masih ada masyarakat yang mengalami keterbatasan kemampuan dalam penggunaan informasi teknologi serta keterbatasan dana pelanggar yang harus dibayarkan seketika saat terjadinya pelanggaran.
 - e. Faktor kebudayaan, yakni masih terdapat masyarakat yang menganggap mekanisme e-tilang berbelit-belit serta masih terdapat beberapa golongan masyarakat yang masih awan atau melek IT sehingga mereka beranggapan bahwa program ini ribet. Selain itu terdapat pula beberapa masyarakat yang masih apatis terhadap aplikasi e-tilang. Banyak pelanggar yang tidak bersedia memberikan nomor ponselnya karena merasa itu adalah privasi. Penggunaan aplikasi e-tilang harus mencantumkan nomor HP, sementara masih banyak warga masyarakat yang keberatan.

SARAN

Adapun saran yang penulis rekomendasikan berkaitan dengan kesimpulan di atas adalah sebagai berikut:

1. Dalam rangka lebih mengefektifkan penurunan angka pungli dalam penegakan hukum berlalu lintas melalui sistem e-tilang, perlu diupayakan pemberian tunjangan bagi aparat kepolisian yang anggarannya diambil dari penerimaan negara bukan pajak berupa pembayaran denda pelanggaran. Adapun Pemberian tunjangan ini diberikan sesuai dengan jumlah pelanggaran yang ditangani oleh setiap personil kepolisian. Dengan mekanisme ini diharapkan aparat kepolisian yang bertugas di satuan lalu lintas tidak terpengaruh oleh adanya tawaran penyelesaian perkara secara damai yang tidak sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Berkaitan dengan penghambat pelaksanaan sistem e-tilang penulis merekomendasikan hal-hal sebagai berikut;
3. Perlu diupayakan pembentukan payung hukum sistem e-tilang yang tidak hanya berfokus pada aspek efisiensi melainkan juga harus terhindar dari adanya

benturan kewenangan antar penegak hukum sehingga dapat mewujudkan sinergi dalam penegakan hukum berlalu lintas. Perlu dilakukan pemberdayaan aparatur khususnya personil kepolisian melalui pelatihan penggunaan aplikasi e-tilang sekaligus juga dilakukan pembenahan terkait dengan fasilitas penunjang yang dibutuhkan aparat dalam melaksanakan program e-tilang.

4. Perlu dilakukan sosialisasi secara intensif kepada masyarakat berkaitan dengan program e-tilang ini agar masyarakat dapat memahami secara komperhensif meknisme serta esensi e-tilang dalam rangka menekan angka pungli dalam penegakan hukum berlalu lintas.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariefulloh, A., Asis, A., & Maskun, M. (2019). Dilema Penerapan Sanksi Pelanggaran Lalu Lintas Terhadap Anak. *Jambura Law Review*, 1(2), 192-211.
- Djanggih, H., & Ahmad, K. (2017). The Effectiveness of Indonesian National Police Function on Banggai Regency Police Investigation (Investigation Case Study Year 2008-2016). *Jurnal Dinamika Hukum*, 17(2), 152-157.
- Edy, E., Hamka, H., & Maldun, S. (2018). Implementasi Kebijakan Peraturan Presiden No 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tuagas Sapu Bersih Pungutan Liar. *Jurnal Paradigma Ilmu Administrasi Negara*, 1(1), 32-37..
- Fiqi, A. (2019). Penegakan Hukum Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Polres Sampang. *Dinamika Hukum*, 25(14).
- Indrajit, R. E. (2000). Manajemen sistem informasi dan teknologi informasi. *Jakarta: PT Elex Media Komputindo*.
- Junef, M. (2014). Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (Tilang) Dalam Berlalu Lintas. *E-Journal Widya Yustisia*, 1(1).
- Pembayun, J. G., Mazid, S., & Rihardi, S. A. (2019). Peningkatan Kesadaran Masyarakat Mengenai Pentingnya Tertib Berlalu Lintas Di Desa Sutopati, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang. *Swadaya: Indonesian Journal of Community Empowerment*, 1(03), 149-162.
- Putra, R. H. W. (2020). Peran E-Tilang dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Guna Mewujudkan Kamseltibcar Lantas di Wilayah Hukum Polres Banyumas. *Police Studies Review*, 4(1), 373-416.
- Rochman, F., & Agis, A. (2020). Efektivitas Fungsi Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas. *Indonesian Journal of Criminal Law*, 2(2), 76-92.
- Sari, D. P. Y. P., & Hendriana, R. (2019). Pelaksanaan Sanksi Denda E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, 2(1), 63-71.
- Setiyanto, S., Gunarto, G., & Wahyuningsih, S. E. (2017). Efektivitas Penerapan Sanksi Denda E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Di Polres Rembang). *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12(4), 742-766.

- Soekanto, S. (2004). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Cet. V, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Subuh, D., Harsono, D., Sulistiyowati, R., & Khasanah, K. (2019). Implementasi Business Intelligence pada Aplikasi E-Tilang dengan Menggunakan Tableau Server. Seminar Nasional GEOTIK 2019.
- Wayne, A. M. (2020). Efektivitas Penerapan E-Tilang dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Banyumas. *Police Studies Review*, 4(1), 57-120.
- Wulandari, A. S. (2020). Inovasi Penerapan Sistem E-Tilang di Indonesia. *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 14(1), 1-10.